

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JENEPONTO**



AYYUB SRIADI AHMAD

Nomor Stambuk: 105641110916

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JENEPONTO**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

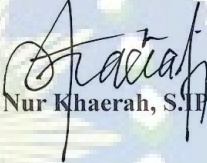
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jeneponto
Nama Mahasiswa : Ayyub Sriadi Ahmad
Nomor Induk Mahasiswa : 105641110916
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

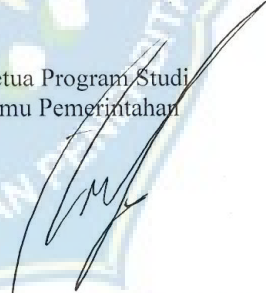

Nur Khaerah, S.IP., M.IP.

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor 0234/FSP/A.4-II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, 27 Februari 2024.



Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.si
NBM:730727


Andi Luzzur Prianto, S.IP., M.Si
992797

Tim Penguji:

1. Dr. H. Amir Muhiddin, M.si
2. Hamrun, S.IP., M.Si
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP

()
()
()

ABSTRAK

Ayyub Sriadi Ahmad. 2024. Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan tokoh dari instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jeneponto terdiri beberapa poin yaitu perumusan dan pelaksanaan. Perumusan diantaranya adalah Visi dan misi Bapenda Jeneponto memiliki prinsip yaitu meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel sehingga melahirkan perencanaan dan tujuan strategi yang jelas. Perencanaan ini akan melahirkan kesejahteraan dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto yang ada. Tujuan strategi Bapenda Jeneponto salah satunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto.

Pelaksanaan diantaranya adalah pemimpin yang solid, kebijakan yang tepat, alokasi yang cukup dan kondisi terhadap keberhasilan. Dalam penelitian ini, telah dideskripsikan bahwa pemimpin telah menjalin kerjasama yang baik melalui komunikasi yang baik pula. Tak hanya itu poin kebijakan yang tepat ditandai dengan kebijakan Undang Undang tentang Pendapatan Asli Daerah yang telah dilaksanakan. Alokasi sumber daya yang cukup belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dalam penelitian ini bahwa salah satu faktor penghambat keberhasilan capaian adalah karena kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan bidang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jeneponto". Tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan salam kepada Nabil Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa manusia dari jaman gelap ke masa depan yang cerah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi pembaca secara umum dan khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak. Terutama dan istimewa penulis persembahkan dan sampaikan kepada kedua orangtua yang sangat berjasa dan senantiasa memberikan dukungan moral dan moril, perhatian dan kasih sayang serta do'a tulus tanpa pamrih, bimbingan serta pengorbanan yang tak pernah luntur dan tak ternilai dengan apapun. Serta pada kesempatan ini saya ingin berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis.

2. Ibu Nur Khaerah selaku Pembimbing II dan sekaligus sebagai sekretaris program studi Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar yang selalu sabar mendengar keluh kesah penulis.
3. Kepada Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga untuk memimbing penulis sampai penulis bergelar sarjana Ilmu Politik.
4. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberikan pula arahan positif untuk penulis lebih baik kedepannya.
5. Segenap dosen dan staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 24 Februari 2024

Penulis

Ayyub Sriadi Ahmad

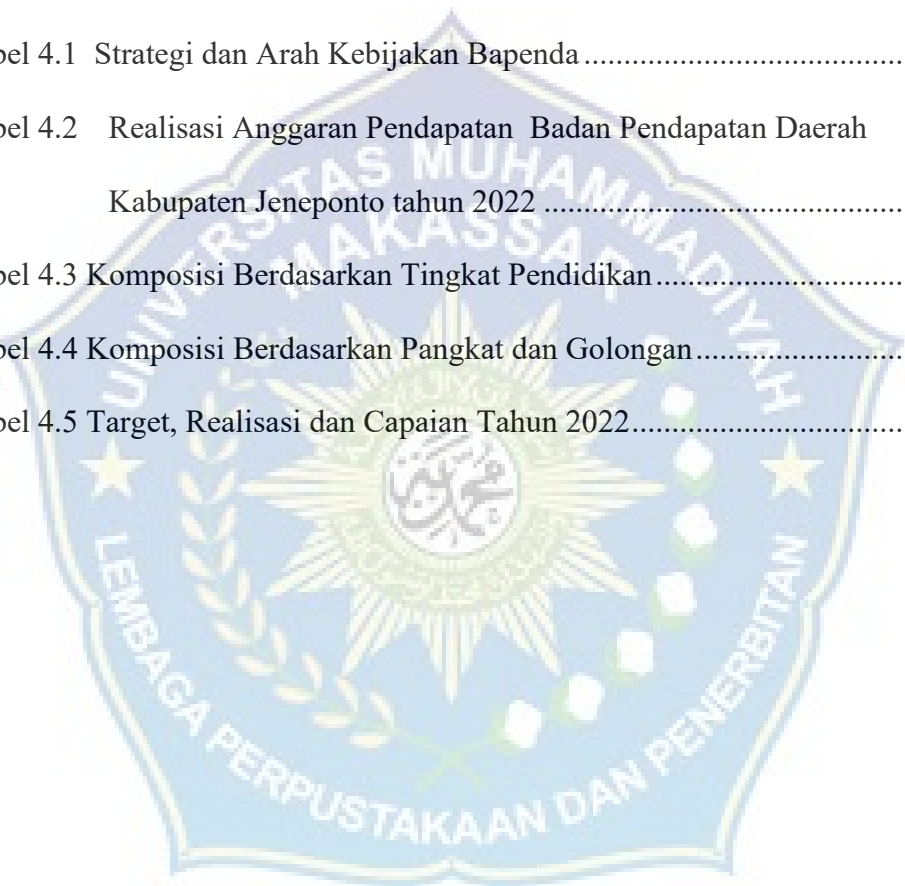
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Konsep dan Teori.....	10
1. Strategi	10
2. Strategi Pemerintah.....	11
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
C. Kerangka Pikir	18
D. Fokus Penelitian	19
E. Deskripsi Fokus Penelitian	20

BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
B. Jenis Penelitian	21
C. Tipe Penelitian	21
D. Informan Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	24
G. Teknik Pengabsahan.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
B. Hasil Penelitian Tahapan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jenepono	33
C. Alokasi Sumber Daya yang Cukup	42
D. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	48
A. Simpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2017-2018.....	2
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	23
Tabel 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda	38
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2022	41
Tabel 4.3 Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4.4 Komposisi Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	43
Tabel 4.5 Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	19
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan memberikan kesempatan kepada daerah agar mengelola seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di daerahnya. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah. Dalam hal ini, terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah, sehingga tuntunan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat (Halim, 2011). Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan porsi belanja daerah yang sangat lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat mengalami penurunan diakibatkan dari beberapa faktor antara lain pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. Ketiga, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, kelemahan kualitas

SDM aparatur. Perlu adanya penetapan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka panjang yaitu sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang optimal serta sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang efektif dan efisien. Sehingga pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, membutuhkan strategi dalam peningkatan perekonomian daerah.

Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Jeneponto menguraikan bahwa di tahun 2017-2018 target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan persentase.

Tabel 1.1 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2017-2018.

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	117.082.139.184	117.043.235.308	99,97%
2018	120.759.596.472	101.938.748.632	84,41%

Target tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto sebesar 117.082.139.184 dengan jumlah realisasi 117.043.235.308 dan persentase 99,97%. Sedangkan target di tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto sebesar 120.759.596.472 dengan jumlah realisasi 101.938.748.632 dan persentase 84,41%. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto menunjukkan jumlah target dan realisasi dari tahun 2017-2018 tidak di maksimalkan dengan baik. Dengan adanya sebuah tantangan atau permasalahan didalamnya tentu akan

berdampak pada pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto.

Permasalahan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto adalah masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (membayar pajak sesuai ketentuan), belum adanya mobil operasional pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), belum tersedianya pelayanan pembayaran pajak keliling (mobile), belum optimalnya sistem pengelolaan database pajak daerah yang ada, masih terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah dan belum adanya Sistem dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, terbukti masih banyaknya WP yang terlambat dalam membayar PBB. Hal ini terlihat bahwa realisasi PBB yang diterima setiap tahunnya tidak menentu, kadang mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2021, pada tahun 2016 Kabupaten Jeneponto tidak pernah mencapai target yang sebesar 66,8 % dengan rencana target 3.856 dan terealisasi 2.575. Namun untuk tahun 2017 rencana target sebesar 4.252 dan terealisasi 3.179 tetap tidak mencapai target namun mengalami peningkatan presentasi sebesar 74,9 %, hal ini dapat dikatakan bahwa realisasinya yang kurang dari target.

Dengan adanya strategi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dapat mengurangi masalah dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Disisi lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh

dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah agar kedepan lebih baik (Yudartha, 2009). Optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan (Soesastro, 2005). Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah serta menciptakan persaingan yang sehat antar-daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Dari hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JENEPONTO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah, serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian tentang strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat menambah wawasan peneliti mengenai realisasi keuangan daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jeneponto sehingga dapat memberikan pengalaman, pengetahuan dan pembelajaran terutama saat melaksanakan penelitian.
- b. Bagi pihak instansi, penelitian ini berupaya untuk memberikan informasi kepada pihak instansi agar bisa memberikan persepsi positif kepada masyarakat tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah dan memberikan masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dalam hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto.
- c. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas, dan dapat memberikan atau dijadikan referensi bagi mahasiswa lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dianggap penting karena bertujuan untuk mendapatkan berbagai perbandingan serta pandangan menjadi bahan untuk pengacuan referensi peneliti. Selain itu juga menghindari asumsi bahwa adanya kesamaan dengan penelitian lain. Dengan adanya *studi literature* peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Mulyadi Soamole/2013	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Sula)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dari pembangunan ekonomi yang cukup signifikan karena diimbangi dengan belanja pemerintah dalam bidang infrastruktur.
2.	Nursafitra M/2019	Strategi Peningkatan PAD melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di

			<p>Kabupaten Enrekang dilakukan dengan program intensifikasi yaitu aspek kelembagaan yakni memperbaiki aspek kelembagaan atau pengelolaan pendapatan asli daerah, aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah wajib pajak, menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta aspek personalianya yakni meningkatkan mutu sumberdaya manusia atau aparatur pengelola penapatan daerah.</p>
3.	Kusumawati/2018	Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Kesimpulan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.
4.	Nofrizal/2017	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara stimulant berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
5.	Windy Noviana/2018	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditentukan oleh lima faktor yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas

			<p>pelayanan petugas pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kemudahan pajak dan sanksi perpajakan. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Gianyar dalam masalah tersebut adalah menurunkan tarif pajak, melakukan sosialisasi, melakukan pelayanan prima dan mengenakan sanksi secara adil.</p>
6.	Tirza Aditya & Chairil Anwar Pohan/2018	Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Cempaka Putih	<p>Secara keseluruhan, maka tingkat kontribusi pajak reklame di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 63,22%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 43,06%. Tahun 2016 mengalami kenaikan kontribusi menjadi 107,34%.</p>

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Soamole (2013) adalah sama-sama mengidentifikasi Pendapatan Asli Daerah disebuah Kabupaten. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah tidak memfokuskan bagaimana strategi yang dilakukan untuk memaksimalkan anggaran Pendapatan Asli Daerah di beberapa Kabupaten. Perbedaan penelitian selanjutnya dari Nursafitra (2019)

dengan penelitian peneliti adalah tidak memfokuskan bagaimana seharusnya pemerintah daerah bertindak untuk mengatasi permasalahan Pendapatan Asli Daerah. Namun persamaannya adalah sedikit menguraikan bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian Kusumawati (2018) dengan penelitian peneliti adalah tidak memfokuskan pada bagaimana Pendapatan Asli Daerah itu harus ditingkatkan. Sedangkan persamaannya adalah beberapa penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya, perbedaan penelitian dari Nofrizal (2017) dengan penelitian peneliti adalah tidak memfokuskan penjelasan tentang strategi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menguraikan poin tentang Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian yang kelima dari Noviana (2018) dengan penelitian peneliti adalah lebih menjelaskan strategi kepatuhan wajib bayar pajak sedangkan peneliti ingin mengetahui strategi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang konsep Pendapatan Asli Daerah pula. Terakhir, perbedaan penelitian dari Aditya & Pohan (2018) dengan penelitian peneliti adalah lebih menjelaskan strategi peningkatan penerimaan pajak reklame sedangkan persamaannya sedikit membahas tentang strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan enam penelitian terdahulu diatas, peneliti menjadikan referensi serta menjadikan acuan dengan menarik beberapa kesamaan dan perbedaan dalam pembuatan topik penelitian peneliti. Dimana, peneliti akan mendeskripsikan

strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini akan menemukan temuan terbaru, mengingat dalam penelitian terdahulu diatas tidak ada yang menjelaskan tentang strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan dalam beberapa peneliti diatas lebih menjelaskan tentang pengaruhnya Pendapatan Asli Daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota. Sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan guna menjadi referensi bagi peneliti yang lain.

B. Konsep Teori

1. Strategi

Menurut Siagian (2004), strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Tedjo Tripomo (2005), menyatakan bahwa strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Menurut Freddy (dalam Rangkuti, 2003) strategi merupakan respon secara terus-menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Thomson (dalam Oliver 2007) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktifitas. Sementara itu strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif. Menurut Porter (dalam

Rangkuti, 2002) strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersaing.

Berasal dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi didefinisikan menjadi suatu seni dalam merencanakan mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan hal-hal strategis dengan memakai kecakapan serta asal daya suatu organisasi agar mencapai suatu target melalui hubungan yang efektif menggunakan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

2. Strategi Pemerintah

Secara etimologi strategi merupakan sesuatu yang berasal dari kata yang dalam bahasa Yunani, *stratego*. Dengan terjemahan sebagai “komandan militer” yang berasal dari zaman demokrasi Athena. Istilah strategi digunakan untuk memenangkan suatu peperangan dalam permasalahan dunia militer yang berbagai cara digunakan untuk memanfaatkan kekuatan militer. Sedangkan terminologi strategi banyak ahli yang mengemukakan sudut pandang yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya mempunyai arti yang sama yaitu pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan dalam sebuah organisasi (Hutapea, 2017). Strategi adalah suatu rangkaian dari keputusan atau tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh para jajaran agar sesuatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Wheelen dan Hunger (2012) memberikan pendapat yang sama mengenai strategi dimana tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan keputusan jangka panjang disuatu perusahaan atau instansi. Sedangkan Suryono (2004) mengungkapkan bahwa strategi selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu tujuan, sasaran dan cara. Oleh karena itu ketiga prinsip tersebut harus dimiliki dalam penerapan strategi yang ingin dijalankan. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu metode atau cara pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dengan respon terus menerus terhadap peluang suatu rangkaian dari keputusan manajerial yang meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi dan kontrol guna mengatasi permasalahan dan untuk memenuhi tujuan dari organisasi.

a. Tahap-Tahap Strategi

Tahap strategi merupakan penyelesaian masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam pengambilan keputusan yang dibuat untuk menemukan langkah yang tepat dari masalah tersebut. Dalam hal ini agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, strategi yang dibuat bisa diimplementasikan dalam penyelesaian masalah yang terjadi, sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya.

Menurut Haryadi (2005) berpendapat bahwa ada dua tahap strategi, kedua tahap strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perumusan

Menjelaskan tahap pertama dari bagian yang meliputi analisis lingkungan internal maupun eksternal adalah penetapan visi, dan misi, perencanaan dan tujuan strategi. Perumusan strategi bagian dan proses dalam menyusun langkah-langkah yang akan datang agar bisa membangun visi dan misinya dari perumusan tersebut dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut agar tercapainya penyediaan *costumer value* terbaik.

2) Pelaksanaan

Setelah tahap perumusan strategi dapat terselesaikan maka selanjutnya tahap krusial dalam strategi pemerintah adalah tentang pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan dijalankan melalui pembangunan struktur, pembangunan program, budget dan pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan tidak sesuai dengan perkiraan semula.

Keberhasilan dalam strategi tentunya harus didukung perusahaan yang *capable* dengan seorang pemimpin yang solid, kebijaksanaan yang tepat, alokasi sumber daya yang cukup, situasi, budaya dan kondisi terhadap keberhasilan dari pelaksanaan strategi. Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa tahap strategi merupakan langkah-langkah dalam pembuatan kebijakan yang tepat dengan merumuskan visi dan misi dari kebijakan tersebut, kemudian setelah dirumuskan dibutuhkan

pelaksanaan yang tepat pula agar strategi dari kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya.

b. Jenis-Jenis Strategi

Ada beberapa instansi atau organisasi yang menjalankan suatu strategi atau lebih secara bersamaan, namun hal tersebut dapat sangat beresiko dan mengancam jika dijalankan terlalu jauh diperusahaan yang besar dan terdiverifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Adapula instansi pemerintah atau organisasi yang bertahan untuk tetap hidup dengan menggunakan gabungan dari sejumlah strategi divestasi, seperti likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Adapun jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi integrasi, strategi integrasi terbagi 2 macam yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Suatu strategi integrasi vertikal atau dari atas kebawah dapat memungkinkan perusahaan yang dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan/atau pesaing.
- 2) Strategi intensif, penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.
- 3) Strategi diversifikasi, adapun strategi diversifikasi yang harus dipahami, yaitu diversifikasi horizontal, konglomerat dan konsentrik.

Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

- 4) Strategi Defensif, Ada tiga strategi defensif yang perlu diketahui adalah strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.

c. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi karena meliputi tindakan dan koordinasi dalam mencapai tujuan. Adapun menurut Grant dalam (Salisman, 2019) strategi mencakup 3 peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, yaitu:

- 1) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai kesuksesan, strategi suatu hal yang akan memberikan suatu ikatan hubungan antara hasil-hasil dari ide yang diambil oleh individu atau instansi terkait.
- 2) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Strategi memiliki peranan penting sebagai sarana koordinasi dan komunikasi agar untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- 3) Strategi sebagai target. Konsep strategi akan disatukan dengan suatu visi dan misi untuk menuntukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan

datang. Menetapkan suatu tujuan dapat membantu seorang individu dapat didengarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut penjelasan umum Undang-Undang No 33 Tahun 2004 pasal 18 mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memnuhi belanja daerah. Dimana pendapatan daerah dapat diperoleh dari hasil perusahaan daerah, pasar, pajak, reklame, retribusi, pajak bumi dan bangunan serta usaha-usaha lainnya.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017). Halim (2011) berpendapat Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna untuk menunjang pembangunan daerah serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut (Hidayat, 2009).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya (dalam Aha, 2021) Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dan terus menerus dipicu pertumbuhannya. Kemajuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang positif disisi penerimaannya dan perannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Secara garis besar sumber-sumber penerimaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan dana pada dasarnya dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak, adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipisahkan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi, adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, penerimaan dari sumber ini

merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara.

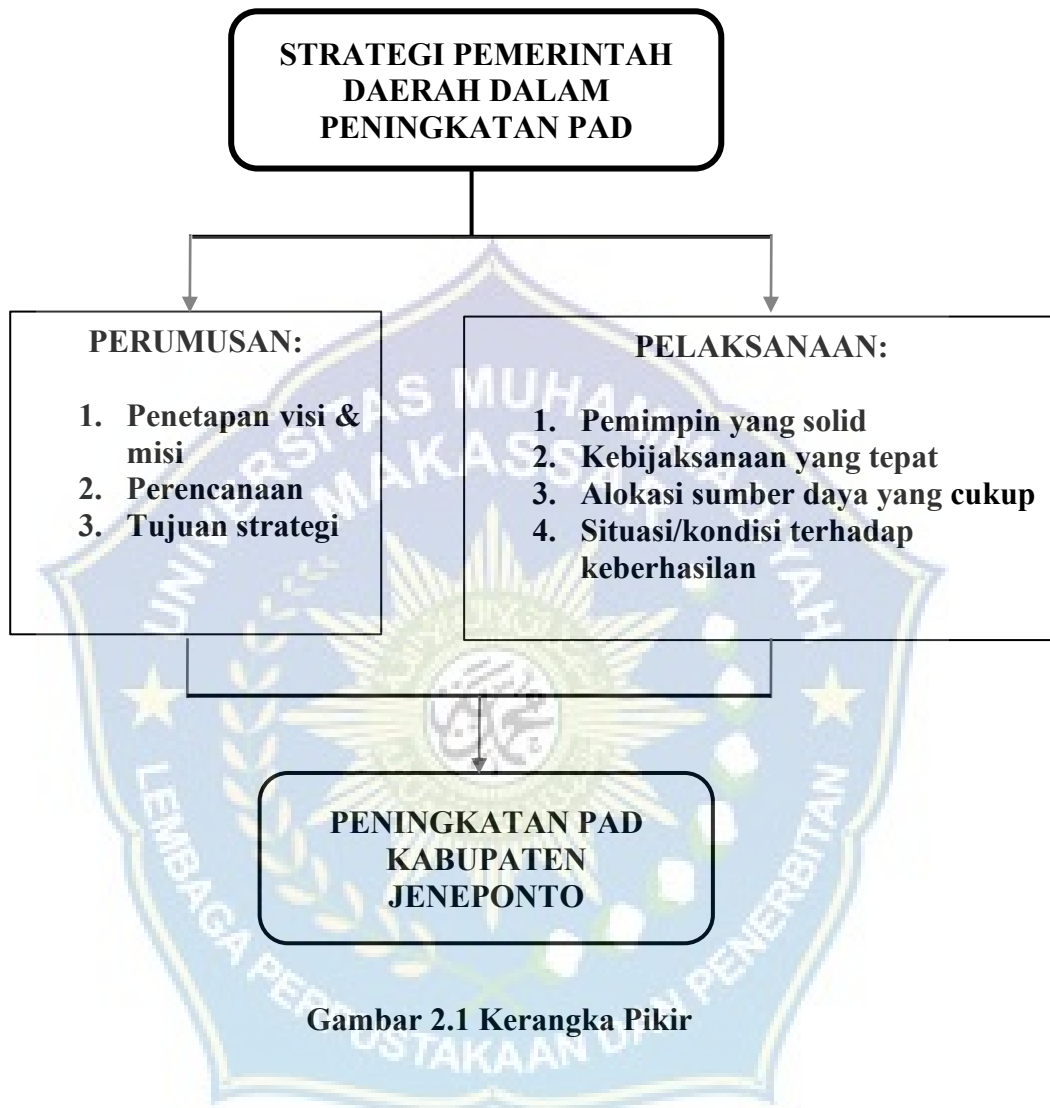
- c. Pinjaman, pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Kesimpulan dari beberapa definisi diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pengertian dari Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang dianggap penting. Pada dasarnya kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian, yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Oleh karena itu melihat tinjauan pustaka diatas yang terkait tentang prosedur strtategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti menggunakan konsep tahap strategi dari Haryadi (2005) yaitu perumusan dan pelaksanaan. Dengan adanya prosedur strategi setidaknya dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto sehingga menciptakan kesejahteraan bagi

masyarakat sekitar. Maka dari itu kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian dengan meneliti tahapan pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto guna memaksimalkan anggaran yang ada untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Jeneponto.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perumusan, bagian dan proses dalam menyusun langkah-langkah dalam hal ini pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto agar dapat membangun visi dan misinya dari perumusan merancang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pelaksanaan, proses dimana strategi dan kebijakan pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto yang dijalankan melalui pembangunan struktur, pembangunan program, budget dan pelaksanaan untuk memaksimalkan Peningkatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini selama kurang lebih 2 bulan, setelah dikeluarkannya surat izin penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Jeneponto tepatnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto merupakan instansi yang memiliki data yang sangat lengkap terutama terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai objek penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi secara langsung, catatan lapangan, dokumen pribadi dan catatan resmi lainnya. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini akan memberikan gambaran dan melukiskan keadaan dilokasi penelitian berdasarkan fakta yang ada dilokasi penelitian. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah proses mendapatkan dari subjek dan objek data. Data yang dimaksud digolongkan menjadi dua bagian yaitu data

sekunder dan data primer. Penggolongan ini dilakukan demi menjaga keakuratan dan relevansi serta kekayaan data yang diperoleh dilapangan sehubungan dengan objek penelitian ini.

1. Data primer, data pokok yang dipakai pada penelitian agar dapat menarik kabar yang akurat. Data primer ini dapat diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi relevan dan akurat yang ada dilapangan. Data primer sangat menentukan keakuratan asal informasi atau data yang diperoleh karena melalui data primer seluruh informasi yang krusial diperoleh guna menarik suatu konklusi dan menjawab problem yang muncul pada penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi perangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini bersumber dari data pendukung sebab berisi dengan informasi pendukung yang bersifat sebagai informasi tambahan atau pendukung dari data primer.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Jeneponto. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan
1.	Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jeneponto
2.	Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jeneponto
3.	Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jeneponto
4.	Kabid Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak di Kabupaten Jeneponto
5.	Kasubbid Penetapan Pajak Daerah Kabupaten Jeneponto

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, dalam teknik observasi ini peneliti tidak hanya mengamati obyek studi tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada obyek tersebut. Menurut Creswell (2016), observasi merupakan sebuah penelitian yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
2. Wawancara, Dalam proses wawancara ini terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari

informan sedangkan pihak lain sebagai pemberi informan atau responden (Creswell, 2016). Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang dijadikan sebagai informan yang telah disebutkan di atas.

3. Dokumentasi, dimana arsip dan laporan mengenai data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian.

F. Teknis Analisis Data

Hasil pengolahan data penelitian nantinya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang berkaitan (Sugiyono, 2018). Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif yakni menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi menurut Sugiyono (2018), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2018), ada tiga macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya sumber ini membandingkan dengan cara mengecek ulang dengan informan peneliti yang berbeda. Misalnya, membandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik artinya teknik yang mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data penelitian diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik tersebut dihasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus berdiskusi dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Artinya, data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum terlalu banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto

Gambaran organisasi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jeneponto mengalami penyederhanaan birokrasi sesuai amanat Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan badan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto, Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai

unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, karena institusi Badan Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun 2016, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum terlalu menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga

persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Badan Pendapatan Daerah tentang regulasi tersebut;

4. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai;
5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah.

2. Tugas Pokok Struktur Organisasi

Tugas pokok serta rincian tugas Lingkungan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 73 Tahun 2021, masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Badan, Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
2. Sekretariat, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka

penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam lingkup Bapenda yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melakukan urusan administrasi, urusan ketatausahaan Badan yang meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata laksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin dan melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja yang menjadi kewenangannya yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pemanfaatan anggaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan

Bapenda yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Pajak, Bidang Pajak dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendataan, penetapan, penagihan, keberatan dan pengkajian pajak yang dikelola daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dipimpin Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melakukan program dan kegiatan di bidang pendataan dan penetapan pajak yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sub Bidang Penagihan Pajak dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melakukan program dan kegiatan di bidang penagihan pajak yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Retribusi Daerah, Bidang Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendataan, penetapan,

penagihan, keberatan dan pengkajian retribusi yang dikelola oleh Daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah dipimpin Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melakukan program dan kegiatan di bidang pendataan dan penetapan retribusi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bidang Penagihan Retribusi dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melakukan program dan kegiatan di bidang penagihan retribusi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang PBB dan BPHTB yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melakukan program dan kegiatan di bidang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melakukan program dan kegiatan di bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Sub Bidang Pengembangan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Hasil Penelitian Tahapan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto. Pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di setiap daerah akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan menciptakan keadilan sesuai kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang diinginkan semua instansi agar kebutuhan kebutuhan yang diperlukan dapat tercukupi. Sehingga dalam penelitian ini, akan dideskripsikan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam peningkatan asli daerah di kabupaten Jeneponto menggunakan teori Haryadi (2005) yaitu perumusan dan pelaksanaan.

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi didalam sebuah instansi pemerintahan mencakup beberapa poin penting diantaranya adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi. Sehingga dalam strategi pemerintah ini diharapkan mampu dilaksanakan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Aktivitas pertama dilakukan adalah merumuskan pernyataan visi dan misi sebuah instansi. Visi yang dimiliki oleh instansi pemerintah merupakan suatu cita-cita tentang keadaan di masa depan yang ingin diwujudkan oleh seluruh personel instansi pemerintah, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan.

a. Penetapan Visi Misi

Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Selain dari pernyataan tersebut, narasumber peneliti mengatakan hal yang senada mengenai perumusan Strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto yaitu Bapak Sudirman, S.Sos selaku pelaporan dan penyusunan program mengatakan bahwa:

"Tentu dalam sebuah instansi pasti memiliki visi misi yang jelas. Kearah mana seharusnya kita mencapai tujuan, itu semua berdasar pada Visi misi yang ditentukan sebelum strategi mulai dijalankan. Visi yang jelas sangat membantu dalam menjabarkannya ke dalam tujuan (goal) organisasi atau instansi pemerintah." (Wawancara bersama Bapak Sudirman, 3 Januari 2024).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa penetapan visi misi adalah langkah awal untuk menetapkan sebuah strategi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto. Visi misi yang jelas akan membantu para pegawai untuk mengacu pada prinsip awal sehingga sasaran dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto tepat sasaran atau berhasil dicapai. Selain dari pernyataan diatas, Bapak Sudirman, S.Sos selaku pelaporan dan penyusunan program menambahkan bahwa :

"Penetapan visi misi memudahkan kami untuk melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto. Salah satunya dengan selalu mengutamakan integritas dalam menginput anggaran anggaran yang ada". (Wawancara bersama Bapak Sudirman, 3 Januari 2024).

Dari pernyataan diatas, dalam menetapkan visi misi harus berhati-hati karena visi misi merupakan prinsip setiap pegawai untuk mencapai apa yang diinginkan terutama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto. Sesuai dengan visi Pemerintahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, yaitu "Jeneponto Smart 2023 (Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan)". Badan Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada misi 6 pada RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 yaitu "Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel". Untuk mewujudkan misi tersebut maka program yang akan dilaksanakan yakni program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Pengelolaan Keuangan Daerah dan program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

b. Perencanaan

Selain daripada visi dan misi, poin kedua yang terpenting dalam perumusan strategi adalah perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto. Hal ini disampaikan pula oleh Bapak Sudirman, S.Sos selaku pelaporan dan penyusunan program menambahkan bahwa :

"Dalam perencanaan di Badan Pendapatan Daerah ini, tentu membahas tentang bagaimana rencana kita dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto ini. Sesuai dengan visi misi sebelumnya, tidak terlepas dari perencanaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". (Wawancara bersma Bapak Sudirman, 3 Januari 2024).

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa langkah terpenting setelah penetapan visi misi ini adalah merumuskan perencanaan dalam jangka

panjang. Perencanaan ini akan melahirkan kesejahteraan dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto yang ada. Oleh karena itu, strategi perencanaan yang dibuat perlu bersifat konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Poin ketiga yang termasuk dalam perumusan strategi adalah tujuan strategi. Agar sebuah visi kesuksesan memiliki efektifitas yang kuat terhadap keputusan dan tindakan, harus didistribusikan dan didiskusikan secara menyeluruh dan transparan, dan harus mengacu secara tetap bahwa visi sebagai alat untuk menentukan respon tepat terhadap bermacam-macam situasi yang menghadang organisasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

C. Tujuan Strategi

Tujuan strategi dalam sebuah instansi pemerintah ini, tidak terlepas dari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto. Selain dari meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto, tentu pegawai juga harus menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto. Mulai dari pertanggungjawaban, keterbukaan dan keadilan. Jika prinsip dan pegawai sudah menyatu dalam artian berkesinambungan dalam bertindak, tujuan strategi akan dicapai sesuai sasaran visi dan misi Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Jeneponto. Pada dasarnya tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Seperti apa yang disampaikan Bapak A. Abdi selaku Kasubid penerapan Bapenda mengatakan bahwa :

"Tujuan strategi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto tidak hanya untuk menstabilkan anggaran yang digunakan saja, namun bagaimana anggaran ini dapat terealisasi sesuai dengan arah dan tujuan yang ditetapkan".

Tabel 4.1

Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan potensi PAD melalui penyusunan produk hukum daerah	Peningkatan persentase realisasi pendapatan daerah berdasarkan potensi pendapatan daerah
		Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak
		Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar menjadi SDM yang lebih handal dan berkompeten	Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggung jawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap apresiasi kerja yang terukur
		Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT	Pemenuhan kebutuhan Pengelolaan Pelayanan Berbasis IT
		Optimalisasi pelayanan pajak daerah	Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto terkhusus nya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa poin diantara pemimpin yang solid, kebijakan yang tepat, alokasi yang cukup dan kondisi terhadap keberhasilan.

a. Kepemimpinan yang Solid

Poin pertama kepemimpinan yang solid merupakan kumpulan individu yang dapat bekerja sama untuk meraih tujuan dengan cara menggunakan keterampilan serta ide mereka, kemudian mampu mengkolaborasikan semuanya. Dalam hal ini, para pimpinan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto harus berkolaborasi dan bekerjasama sesama pegawai untuk meraih tujuan atau sasaran yang diinginkan. Seperti apa yang disampaikan Bapak A. Abdi selaku Kasubid penerapan Bapenda mengatakan bahwa :

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pegawai harus saling komunikasi satu sama lain mengenai perkembangan setiap bidangnya. Hal ini diperuntukkan untuk menciptakan kepemimpinan yang solid, kuat dan kukuh. Tetap pada satu tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto. Kepemimpinan yang solid menghasilkan arah dan tujuan yang terstruktur dalam instansi pemerintah. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam menjalankan kepemimpinan di setiap bidang. Pertanggungjawaban setiap sub bidang pun sangat diperlukan untuk bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat". (Wawancara bersama Kasubid Bapenda Jeneponto, 3 Januari 2024).

Dalam pernyataan di atas, kepemimpinan yang solid sangat diperlukan dalam sebuah instansi pemerintah. Mulai dari sadar dengan adanya tanggungjawab dan keterbukaan setiap apa yang menjadi tanggungjawab setiap bidang. Selain daripada sikap setiap pemimpin setiap bidang, peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari pemimpin pemimpin yang bertanggung jawab dan menjalin komunikasi yang baik dan solid.

b. Kebijakan yang Tepat

Poin kedua, dalam pelaksanaan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto adalah kebijakan yang tepat. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Seperti apa yang disampaikan Bapak A. Abdi selaku Kasubid penerapan Bapenda mengatakan bahwa :

"Untuk kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, instansi pemerintah telah menjalankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bagaimana kesesuaian anggaran yang digunakan dan dikeluarkan".

Sesuai dengan apa yang disampaikan diatas, maka instansi pemerintah yang seharusnya menjadi tanggungjawab penuh untuk mengelola anggaran yang digunakan. Untuk tahun 2022, Bapenda Jenepono telah menjabarkan beberapa anggaran yang digunakan dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jenepono. Uraian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jenepono tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	20,825,000,000	20,637,466,895	99.10
Pendapatan Retribusi Daerah	147,000,000	64,800,450	44.08
JUMLAH PENDAPATAN	20,972,000,000	20,702,267,345	98.71

Dari uraian pendapatan asli daerah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah direalisasikan di tahun 2023. Dengan masing-masing anggaran yang diberikan yaitu 20.825.000.000 dan 147.000.000 dan direalisasikan masing-masing yaitu 20.637.466.895 dan 64.800.450.

C. Alokasi Sumber Daya yang Cukup

Selain dari uraian diatas, poin terpenting dari pelaksanaan strategi pendapatan asli daerah adalah alokasi sumber daya yang cukup. Dalam melaksanakan tugas, menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto memiliki 37 (tiga puluh tujuh) pegawai dengan komposisi berdasarkan pendidikan serta Pangkat dan Golongan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	LK	PR
1	STRATA 3 (S3)	1	1	-
2	STRATA 2 (S2)	16	9	7
3	STRATA 1 (S1)	19	13	6
4	SMA	1	1	-
	JUMLAH	37	25	12

Keterangan:

LK = Laki Laki

PR = Perempuan

Tabel 4.4 Komposisi Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	PANGKAT GOLONGAN	JUMLAH	LK	PR
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1	-
2	Pembina Tingkat I, IV/b	1	1	-
3	Pembina, IV/a	6	4	2
4	Penata Tk. I, III/d	13	8	5
5	Penata, III/c	7	6	1
6	Penata Muda Tk. I, III/b	2	1	1
7	Penata Muda Tk. III/a	5	1	4
8	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1	1	-
	JUMLAH	37	25	12

Keterangan:

LK = Laki Laki

PR = Perempuan

Dari alokasi sumber daya manusia yang terdaftar pada tahun 2022 menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 37 orang yang menduduki tingkat pendidikan mulai dari strata 1, strata 2, strata 3 dan SMA. Dari jumlah tersebut diharapkan mampu menyesuaikan dan menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang-bidang yang duduki. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak A. Abdi selaku Kasubid penerapan Bapenda mengatakan bahwa :

"Kami sangat mengusahakan mengerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya bidang bidangnya. Mulai dari tingkat pendidikan SMA dan yang tertinggi sampai Strata 3 akan

memaksimalkan kinerjanya. Kami setiap pegawai memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto melalui tanggungjawab fungsi dan tugas tugas pegawai". (Wawancara bersama Kasubid Bapenda Jeneponto, 3 Januari 2024)

Dari pernyataan diatas, beberapa sumber daya yang ada akan memaksimalkan tugas sesuai dengan jabatannya. Melalui kerjasama yang solid dan komunikasi yang teratur maka tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto dapat berjalan dengan lancar.

d. Situasi/Kondisi Terhadap Keberhasilan

Poin penting terakhir dalam pelaksanaan strategi adalah kondisi terhadap keberhasilan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kab. Jeneponto dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Seperti apa yang disampaikan Bapak A. Abdi selaku Kasubid penerapan Bapenda mengatakan bahwa :

"Kondisi terhadap keberhasilan dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mengelola anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Tentunya dengan target yang dipunya maka akan terealisasi dengan baik dan terstruktur".

Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Jeneponto beserta target dan realisasinya dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5 Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Produktivitas Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap PDRB	3,71	5,13	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto untuk Tahun 2022 untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% dan Sasaran Strategis Meningkatkan Produktifitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 171%. Kedua capaian tersebut masuk dalam kategori Capaian Kinerja “Sangat Tinggi”. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian:

1. Tingginya komitmen pimpinan dalam hal pencapaian target penerimaan PAD.
2. Tersedianya regulasi yang terbaru yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Tersedianya sistem informasi pendapatan daerah yang memudahkan para wajib pajak dan retribusi dalam melakukan pembayaran.
4. Terjalannya koordinasi yang intens antar Pimpinan OPD Pengampuh PAD.
5. Tingginya kerjasama TIM pengelola PAD dalam pencapaian tujuan.

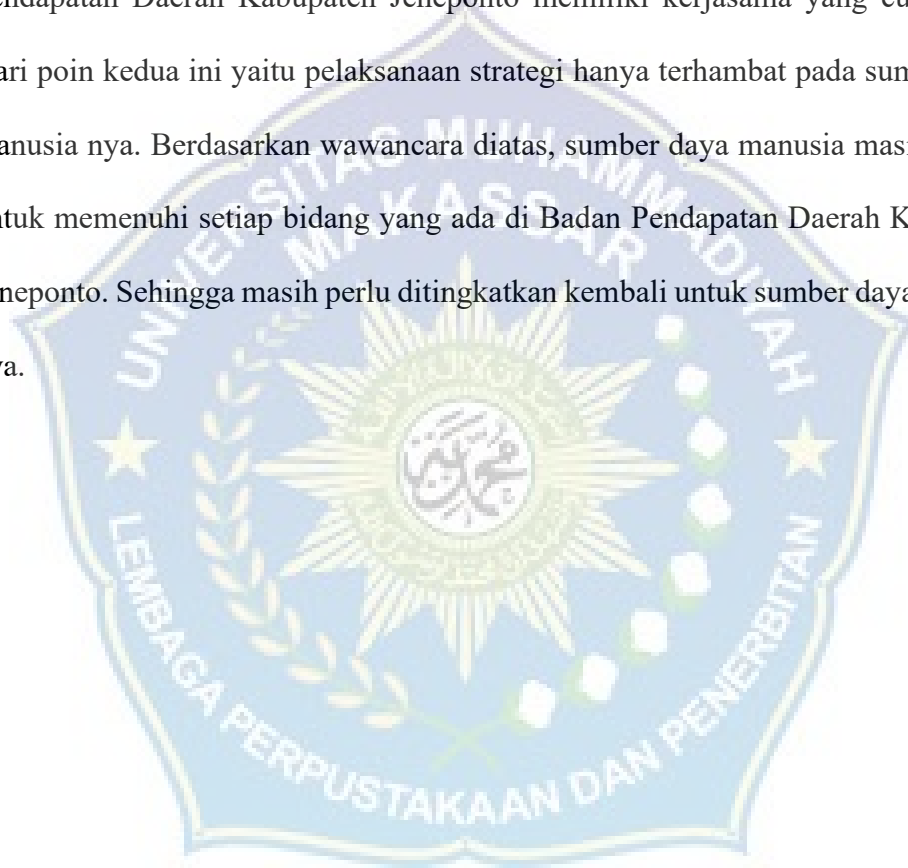
Faktor Penghambat Keberhasilan pencapaian adalah belum tersedianya pelayanan pembayaran pajak keliling (mobile), kedua terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah dan ketiga masih terbatasnya SDM pengelola PAD yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Pembahasan

Keseluruhan dari hasil wawancara diatas terkait strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto mencakup beberapa poin penting diantaranya adalah perumusan dan pelaksanaan. Didalam perumusan, terdapat poin penting didalamnya yaitu penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi. Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto telah memiliki visi dan misi untuk dijalankan sesuai dengan targetnya, salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa dari tahun 2022 hingga 2023 pendapatan asli daerah termasuk pajak daerah dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan atau dalam keterangan sangat tinggi. Sehingga mulai dari penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi dalam perumusan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto berjalan dengan baik.

Selain itu, poin kedua dari strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto adalah pelaksanaan. Didalam

pelaksanaan strategi terdapat pula beberapa poin penting didalamnya diantaranya adalah pemimpin yang solid, kebijakan yang tepat, alokasi sumber daya manusia yang cukup dan bagaimana kondisi terhadap keberhasilannya. Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa pemimpin yang solid telah dijalankan melalui bagaimana komunikasi antara pegawai satu dengan lainnya tetap terjalin. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto memiliki kerjasama yang cukup erat. Dari poin kedua ini yaitu pelaksanaan strategi hanya terhambat pada sumber daya manusianya. Berdasarkan wawancara diatas, sumber daya manusia masih kurang untuk memenuhi setiap bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto. Sehingga masih perlu ditingkatkan kembali untuk sumber daya manusianya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa strategi pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa poin diantaranya perumusan dan pelaksanaan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto. Uraian perumusan dan pelaksanaan strategi akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Perumusan, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto diawali dengan merumuskan beberapa poin yaitu visi dan misi, perencanaan serta tujuan strategi.
 - 1) Visi dan misi Bapenda Jeneponto memiliki prinsip yaitu meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel. Dari sebuah misi, akhirnya melahirkan perencanaan dan tujuan strategi.
 - 2) Perencanaan, dari wawancara diatas, perencanaan yang dimaksud adalah merumuskan perencanaan dalam jangka panjang. Perencanaan ini akan melahirkan kesejahteraan dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto yang ada. Oleh karena itu, strategi perencanaan yang dibuat perlu bersifat konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya.

3) Tujuan strategi Bapenda Jeneponto salah satunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto. Keberhasilan perumusan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto ditandai dengan dilaksanakannya program pendapatan pengelolaan daerah.

2. Pelaksanaan, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto yang kedua adalah pelaksanaan strateginya. Terdapat beberapa poin penting yang ada dalam pelaksanaan strategi yaitu pemimpin yang solid, kebijakan yang tepat, alokasi yang cukup dan kondisi terhadap keberhasilan.

1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto ditandai dengan adanya keberhasilan pemimpin yang solid. Dalam penelitian ini, telah dideskripsikan bahwa pemimpin telah menjalin kerjasama yang baik melalui komunikasi yang baik pula.

2) Tak hanya itu poin kebijakan yang tepat pun dalam penelitian ini juga dilaksanakan dengan baik. Terbukti dengan adanya kebijakan Undang-Undang tentang Pendapatan Asli Daerah yang telah dilaksanakan.

3) Alokasi sumber daya yang cukup belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dalam penelitian ini bahwa salah satu faktor penghambat keberhasilan capaian adalah karena kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan bidang.

4) Poin selanjutnya adalah, kondisi terhadap keberhasilan, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa persentase PAD terhadap PDRB sebesar 5,1% dari target 3,71% dari tahun 2022 hingga 2023 berturut-turut.

B. Saran

Dari kesimpulan dan uraian bab-bab sebelumnya, dapat ditarik saran untuk penelitian selanjutnya yaitu meningkatkan jumlah sumber daya manusia untuk mencukupi kebutuhan bidang bidang yang ada. Agar keseluruhan tugas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai target yang ingin dicapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahya, T. D. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Kabupaten Aceh Jaya*. Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh.
- Baldric, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Creswell, J. W. (2016). *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Craig & Grant. (2006). *Manajemen Strategi*. Jakarta : Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Halim, A. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Afri. (2009). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara*. Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Hutapea. (2017). Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. *Jurnal Organisasi Manajemen*. 4 (1).
- Kusumawati, L., Wiksuana (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 7(5).
- Nursafitra, M., Muh. Nursadik., Dan Muhammad, Y. (2019). Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Vol. 5 No. 1. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/6500>.
- Salisman. (2019). Memahami Organisasi untuk Keunggulan Bersaing (Kajian Manajemen Strategi di Sekolah). *Journal Shautut Tarbiyah*. Vol. 25 No. 1
- Siagian, S. P. (2001). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soamole, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Sula). *Jurnal Governance*, 5(1).
- Soesastro. Hadi. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: Kanisius.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono, D (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono. (2004). *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang, UM. Press
- Tirza, A., Chairil, A., P. (2018). Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Cempaka Putih. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Vol. 5 No. 1. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/467>.
- Wheelen, T dan Hunger, D. (2012). *Strategic Management and Business Policy*. 13th. Prentice Hall.
- Windy, N. (2018). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 15 No. 4. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magistermanajemen/article/view/2286>
- Yudhartha, I. P. D. (2009). *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dikabupaten Banyuwangi (Suatu Studi Tentang Pajak Hotel Dan Restoran)*. Universitas Jember.

L

A

M

P

I

R



A

N

**WAWANCARA BERSAMA NARASUMBER BAPAK A. ABDI SELAKU
KASUBID PENERAPAN BAPENDA.**



**WAWANCARA BERSAMA NARASUMBER BAPAK SUDIRMAN, S.Sos
SELAKU BIDANG PELAPORAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM.**







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ayyub Sriadi Ahmad

Nim : 105641110916

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Murrah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Ayyub Sriadi Ahmad - 105641110916

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Feb-2024 03:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2288627862

File name: Bab_1_1.pdf (205.19K)

Word count: 1071

Character count: 9254

BAB I Ayyub Sriadi Ahmad - 105641110916

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	2%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	idoc.tips Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
5	fdocuments.net Internet Source	2%
6	repository.unwira.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB II Ayyub Sriadi Ahmad -
105641110916

by Tahap Tutup

Submission date: 07-Feb-2024 03:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2288627990

File name: Bab_2_2.pdf (240.72K)

Word count: 2478

Character count: 17158

BAB II Ayyub Sriadi Ahmad - 105641110916

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	8%
2	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	3%
3	kuramaunpam.blogspot.com Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Mercu Buana Student Paper	2%
5	journal.steamkop.ac.id Internet Source	2%
6	jurnal.stai-yaptip.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB III Ayyub Sriadi Ahmad - 105641110916

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Feb-2024 03:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 2288628090

File name: Bab_3_1.pdf (119.66K)

Word count: 861

Character count: 5625

BAB III Ayyub Sriadi Ahmad - 105641110916

ORIGINALITY REPORT

6% SIMILARITY INDEX	6% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	vdocuments.mx Internet Source	2%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	2%
4	ojs.uho.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

BAB IV Ayyub Sriadi Ahmad - 105641110916

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Feb-2024 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2288628299

File name: Bab_4_1.pdf (274.34K)

Word count: 3636

Character count: 24224

BAB IV Ayyub Sriadi Ahmad - 105641110916

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	lms-paralel.esaunggul.ac.id Internet Source	3%
2	palembang.go.id Internet Source	2%
3	pdashi.menlhk.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB V Ayyub Sriadi Ahmad -
105641110916

by Tahap Tutup

Submission date: 07-Feb-2024 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2288628398

File name: Bab_5_1.pdf (670.85K)

Word count: 762

Character count: 4997

BAB V Ayyub Sriadi Ahmad - 105641110916

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	docobook.com Internet Source	5%
----------	--	-----------



Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

RIWAYAT HIDUP



Ayyub Sriadi Ahmad lahir di Garassikang pada tanggal 15 Mei 1995 merupakan anak kedua dari 5 bersaudara buah hati dari Ibu Suriati dan Ayah Ahmad. penulis menempuh Pendidikan pertama di SD Negeri 37 Garassikang pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007, penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Bangkala dan selesai pada tahun 2010, pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Bangkala Barat dan selesai pada tahun 2013, berkat dukungan dari orang tua disertai dengan doa, pada tahun 2020 penulis berhasil lulus masuk Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata (S1). Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menambah ilmu yang merupakan bekal di masa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “ Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jeneponto”.